



Urgensi Pengawasan dalam Aktivitas Dakwah

Nurqistiani^{1*}, Siti Maudillah², Yuniati³, M. Nabil Al-Fayidh⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Dakwah, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

231330013.nurqistiani@uinbanten.ac.id^{1*}, 231330011.maudillah@uinbanten.ac.id²,
231330009.yuniati@gmail.com³, 231330038.nabil@uinbanten.ac.id⁴

Korespondensi penulis: 231330013.nurqistiani@uinbanten.ac.id

Abstract: Controlling of da'wah activities is very important to ensure that the message conveyed is in accordance with the true teachings of Islam and does not deviate from the principles of sharia. In the era of globalization, the challenges faced in da'wah are increasingly complex. Various understandings and interpretations of Islamic teachings have emerged, which often cause conflict and division among the people. Therefore, supervision is the key to preventing ideological deviations and extremism that can damage the image and disrupt social harmony. This research was conducted using the literature study method, namely a research method that is carried out by reading and reviewing various written sources related to the topic being discussed. These sources can be books, scientific journals, articles, or other documents that are relevant to the theme of supervision in da'wah activities. Definition of Supervision Purpose of Supervision Challenges Risks of Da'wah Without Supervision (Controlling) Solutions in Resolving Various Existing Challenges Supervision of da'wah activities is crucial to maintaining religious harmony and national security. However, the challenges faced are very complex, covering regulatory, social, technological, and security aspects. Collaborative efforts are needed between the government, clerics, society, and technology to create an effective monitoring system without stifling freedom of expression. With the right approach, da'wah can remain a means of enlightenment, not a source of conflict.

Keywords: challenges, controlling of da'wah, da'wah activities, da'wah regulations, ideology

Abstrak: Pengawasan terhadap aktivitas dakwah sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. Dalam era globalisasi tantangan yang dihadapi dalam berdakwah semakin kompleks. Beragam pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran Islam muncul, yang tidak jarang menimbulkan konflik dan perpecahan di antara umat. Oleh karena itu, pengawasan menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan ideologi dan ekstremisme yang dapat merusak citra mengganggu keharmonisan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu cara penelitian yang dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber tersebut bisa berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen lainnya yang relevan dengan tema pengawasan dalam aktivitas dakwah. Definisi Pengawasan Tujuan Pengawasan Tantangan Risiko Dakwah Tanpa Pengawasan (Controlling) Solusi dalam Menyelesaikan Berbagai Tantangan yang Ada Pengawasan aktivitas dakwah merupakan hal yang krusial untuk menjaga kerukunan beragama dan keamanan nasional. Namun, tantangan yang dihadapi sangat kompleks, mencakup aspek regulasi, sosial, teknologi, dan keamanan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, ulama, masyarakat, dan pihak teknologi untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif tanpa mengekang kebebasan berekspresi. Dengan pendekatan yang tepat, dakwah dapat tetap menjadi sarana pencerahan, bukan sumber konflik.

Kata Kunci: tantangan, pengendalian dakwah, aktivitas dakwah, regulasi dakwah, ideologi

1. PENDAHULUAN

Dakwah merupakan salah satu aktivitas fundamental dalam Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran dan nilai-nilai agama kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap aktivitas dakwah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. Dalam era globalisasi dan informasi yang serba cepat, tantangan

yang dihadapi dalam berdakwah semakin kompleks. Beragam pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran Islam muncul, yang tidak jarang menimbulkan konflik dan perpecahan di antara umat. Oleh karena itu, pengawasan menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan ideologi dan ekstremisme yang dapat merusak citra Islam dan mengganggu keharmonisan sosial.

Urgensi pengawasan dalam dakwah dapat dijelaskan melalui beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa dakwah tetap berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang autentik. Kedua, dengan banyaknya aliran dan pemahaman yang muncul, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah penyimpangan ideologi yang dapat merugikan umat. Ketiga, dalam dunia informasi yang cepat berubah, pengawasan membantu menjaga kualitas dan relevansi materi dakwah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Lebih lanjut, pengawasan menciptakan transparansi dalam aktivitas dakwah, memungkinkan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan pengajaran yang dilakukan. Selain itu, umpan balik dari proses pengawasan dapat membantu da'i dalam meningkatkan kemampuan dan metode berdakwah mereka, sehingga lebih efektif dalam menjangkau audiens. Pengawasan juga dapat membantu meredakan potensi konflik yang muncul akibat perbedaan pemahaman dalam masyarakat, menjaga keharmonisan sosial. Terakhir, dengan pengawasan yang baik, dakwah dapat lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang dinamis, pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah ada di dalam diri sendiri, sehingga dalam membuat sebuah program harus menyertakan beberapa bentuk kontrol. Tujuannya agar setiap orang yang bekerja di suatu pekerjaan mendapat kesan bahwa pekerjaannya diperhatikan oleh atasan, tidak diperlakukan enteng atau diabaikan. Oleh karena itu, pengawasan terbaik adalah yang didasarkan pada sistem pengawasan terbaik dan orang yang diawasi.

Melalui jurnal ini, kami akan membahas berbagai aspek yang terkait dengan urgensi pengawasan dalam aktivitas dakwah, termasuk tujuan dan tantangan yang dihadapi, risiko dakwah tanpa pengawasan, serta solusi yang diberikan dari pengawasan yang baik. Dengan demikian, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi pengembangan dakwah yang lebih baik di masa depan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengawasan dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, pengawasan memiliki makna yang luas, mencakup aspek spiritual dan struktural. Konsep *al-rīqābah* dalam bahasa Arab mengacu pada pengawasan internal dan eksternal dalam menjaga kesesuaian perilaku terhadap syariat (Sugiharto & Syaifullah, 2023). Pengawasan internal merupakan bentuk kesadaran individu terhadap tanggung jawabnya di hadapan Allah (*muraqabah*), sedangkan pengawasan eksternal dijalankan oleh institusi sosial dan negara. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya introspeksi diri sebelum menilai orang lain (HR. Tirmidzi).

Urgensi Pengawasan Dakwah

Pengawasan dalam aktivitas dakwah sangat penting untuk menjaga otentisitas ajaran Islam serta menghindari penyimpangan ideologis yang dapat memecah belah umat. Menurut Ridwan (2019), tanpa pengawasan, dakwah rentan dimanfaatkan sebagai alat provokasi dan penyebaran paham ekstrem yang bertentangan dengan prinsip Islam rahmatan lil ‘alamin. Dalam konteks ini, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap konten, metode, dan aktor dakwah.

Dakwah di Era Digital

Kemajuan teknologi telah mengubah lanskap dakwah menjadi lebih dinamis dan cepat menyebar. Namun, ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks dan radikalisme keagamaan (Fauzan, 2021; Zarkasyi, 2021). Huda (2020) menambahkan bahwa media sosial membuka ruang ekspresi luas tetapi tidak selalu terkendali, sehingga diperlukan kontrol digital berbasis literasi agama dan teknologi.

Tantangan Pengawasan Dakwah

Tantangan pengawasan dakwah di Indonesia meliputi fragmentasi regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang menolak intervensi negara dalam urusan agama (Hasan, 2021). Selain itu, tantangan sosial dan budaya, seperti keberagaman masyarakat serta meningkatnya dakwah populis dan sensasional, turut menyulitkan upaya pengawasan.

Risiko Dakwah Tanpa Kontrol

Tanpa pengawasan, dakwah berpotensi mengalami distorsi ajaran, eksploitasi komersial, hingga penyesatan umat (Amalia, 2020; Sutrisno, 2019). Hal ini terjadi ketika pendakwah lebih mementingkan popularitas daripada integritas isi dakwah. Ramakrishna (2016) juga menunjukkan bahwa ekstremisme global kerap berakar dari kegiatan dakwah yang tidak terawasi.

Pendekatan Pengawasan yang Efektif

Pengawasan yang efektif harus mencakup pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Pendekatan ini juga menekankan pada evaluasi rutin, pelaporan transparan, dan penggunaan teknologi seperti big data untuk memantau konten dakwah secara digital (Wicahyaningtyas, 2022). Kemenag dan BNPT perlu meningkatkan literasi digital dan sistem sertifikasi da'i untuk memastikan kelayakan materi dan penyampai dakwah.

Solusi Literasi dan Teknologi

Meningkatkan literasi digital menjadi solusi utama dalam menangkal radikalisme digital. Pelatihan kepada masyarakat tentang cara memverifikasi konten keagamaan, serta pemberdayaan tokoh moderat melalui media sosial, dapat menjadi alternatif strategis (Khatibah, 2011). Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk memfilter dan mengidentifikasi konten bermasalah juga sedang dikembangkan oleh pemerintah.

3. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu cara penelitian yang dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber tersebut bisa berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen lainnya yang relevan dengan tema pengawasan dalam aktivitas dakwah.

Langkah pertama dalam studi ini adalah mengumpulkan literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pembahasan, seperti tujuan dan tantangan yang di hadapi, risiko dakwah tanpa pengawasan serta solusi yang diberikan. Setelah itu, penulis membaca dan memahami isi dari literatur tersebut untuk diambil informasi pentingnya. Informasi yang telah diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan kembali dengan bahasa sendiri agar lebih mudah dipahami.

Sumber-sumber yang digunakan dipilih dari bahan yang dapat dipercaya, seperti jurnal- jurnal ilmiah nasional, buku akademik, dan artikel dari situs resmi pendidikan. Dengan cara ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya peran pengawasan dalam kegiatan dakwah agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pengawasan

Istilah “Pengawasan” berasal dari kata dasar “awas” dalam kamus umum bahasa Indonesia (Poerwodarminta, 1999).di maknai sebagai penilikan dan penjagaan. Sedang dalam kamus Oxford (Hornby, 1995) controlling adalah the power or authority to direct, order or manage. Di maknai sebagai kekuatan atau kekuasaan untuk mengarahkan, memerintahkan atau mengatur sesuatu. Dalam bahasa arab di sebut dengan *الْحِرَاسَةُ أَوْ الرِّقَابَةُ* والمُزَاعَاةُ الْجَفْظُ.الرَّقَبَةُ وَالْمُرَاقَبَةُ الْإِشْرَافُ الرَّصْدُ

Secara terminologi terdapat definisi tentang pengawasan di antaranya: (1) Pengawasan sebagai proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa mereka dilaksanakan sesuai rencana dan untuk memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi. (2) Keingintahuan seorang pemimpin terhadap pekerjaan bawahan mereka sesuai dengan rencana, perintah, tujuan yang telah ditentukan, atau kebijakan. (3) Batas kontrol, nilai maksimum atau minimum yang dapat diterima oleh sistem sebagai toleransi dan masih dapat mencapai hasil yang memuaskan. (4) Kegiatan di mana sebuah sistem dioperasikan dalam kerangka norma yang telah ditentukan atau dalam keadaan keseimbangan disebut sebagai pengawasan. Pengecekan memberikan gambaran tentang apa yang memadai, kokoh, atau dapat diterapkan.

Controlling atau pengawasan merupakan salah satu aspek esensial dalam dinamika sebuah organisasi, baik organisasi dalam bentuk perusahaan, pendidikan maupun yang lainnya. Di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata ar-Riqobah atau proses pengawasan, merupakan suatu hal yang penting. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa dan menentukan apakah tugas-tugas perencanaan telah selesai atau belum. Selain itu, tujuannya adalah untuk menilai apakah pelaksanaannya memiliki cacat, kurang terorganisir, atau menyimpang; dan jika ditemukan masalah, maka perlu dilakukan perubahan. Ar-riqobah adalah kewajiban berkelanjutan yang harus dilakukan karena pengendalian adalah memeriksa perencanaan organisasi untuk mencegah kegagalan atau hasil yang lebih buruk. Berikut sabda Nabi Muhammad SAW: Teliti dulu karyamu sendiri, sebelum lihat karya orang lain, dan selidiki dirimu dulu sebelum menyelidiki orang lain(Hadis Riwayat At-Tarmizi).

Pengawasan merupakan elemen kunci dalam manajemen yang tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa rencana dilaksanakan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan yang

penting untuk dipahami.

a. Pemantauan (Monitoring):

Dalam organisasi monitoring memiliki peran yang sangat strategis yaitu untuk mengukur apakah program yang dijalankan dalam hal ini adalah program dakwah berhasil atau tidak dan sejauh mana tingkat keberhasilannya? Dan apa indikasi keberhasilan tersebut? Monitoring berperan mencari dan menerima beraneka ragam informasi khusus, terutama informasi-informasi terbaru untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya, ia muncul sebagai pusat saraf informasi internal dan eksternal tentang organisasi. Contoh, kegiatan yang dapat diidentifikasi adalah kerja monitor, yakni membaca terbitan-terbitan periodik dan laporan- laporan serta memelihara kontak pribadi, memantau tren-tren yang berkembang dalam masyarakat atau keinginan yang muncul saat itu. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam rangka untuk melakukan monitoring, diantaranya :

- 1) Lakukan pemantauan secara reguler terhadap proses pelaksanaan kegiatan dakwah.
- 2) Catat dan dokumentasikan data-data penting seperti jumlah peserta, durasi kegiatan, materi yang disampaikan, dll.
- 3) Identifikasi kendala atau masalah yang muncul selama pelaksanaan.
- 4) Gunakan alat bantu seperti checklist, catatan harian, atau aplikasi digital untuk memudahkan proses pemantauan.

b. Evaluasi:

Mengkaji ulang. Kaji ulang adalah bentuk monitoring yang lebih penting, dilakukan dalam frekuensi yang lebih rendah; biasanya per satu tahun, pada akhir suatu tahapan, atau pada akhir kegiatan. Telaah ulang berfokus khusus pada keefektifan dan dampak langsung dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan dalam program. Dalam telaah ulang kita menilai apakah kegiatan telah menghasilkan keluaran sesuai rencana dan apa dampak keluaran telah membantu tercapainya tujuan proyek atau program. Bagi banyak organisasi, “telaah ulang” disebut evaluasi. Sumber data yang penting untuk ditinjau adalah alat verifikasi di tingkat keluaran dan tujuan yang umumnya bersifat internal dan eksternal, seperti laporan tengah tahun dan tahunan, laporan dari pihak terkait, dokumen-dokumen pengumpulan data, laporan konsultan dan sebagainya. Ada beberapa point yang bisa dilakukan dalam evaluasi sebagai berikut : Lakukan evaluasi secara berkala, misalnya bulanan atau triwulanan, untuk menilai capaian kegiatan.

- 1) Bandingkan hasil pemantauan dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - 2) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian, baik faktor pendukung maupun penghambat.
 - 3) Identifikasi area yang perlu perbaikan atau pengembangan.
- c. Penilaian (Assesment):
- 1) Lakukan penilaian komprehensif di akhir periode kegiatan dakwah.
 - 2) Ukur tingkat pencapaian tujuan dan dampak yang dihasilkan.
 - 3) Bandingkan hasil penilaian dengan rencana awal dan standar keberhasilan yang ditetapkan.
 - 4) Identifikasi hal-hal yang perlu dipertahankan, diperbaiki, atau ditingkatkan untuk kegiatan selanjutnya.
- d. Umpan Balik dan Tindak Lanjut:
- 1) Berikan umpan balik kepada pelaksana kegiatan dakwah mengenai hasil pemantauan, evaluasi, dan penilaian.
 - 2) Diskusikan bersama untuk merumuskan rencana tindak lanjut, seperti perbaikan proses, penyesuaian target, atau pengembangan program.
 - 3) Implementasikan rencana tindak lanjut dan monitor kemajuannya secara berkelanjutan.
- e. Dokumentasi dan Pelaporan:
- 1) Dokumentasikan seluruh proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian secara sistematis.
 - 2) Buat laporan yang berisi informasi mengenai capaian, analisis, dan rencana tindak lanjut.
 - 3) Distribusikan laporan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan.

Dengan melakukan pemantauan, evaluasi, dan penilaian secara teratur, pengelola kegiatan dakwah dapat memastikan program berjalan efektif, relevan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Tujuan Pengawasan

Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiyah, dan bukan untuk menjatuhkan. Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi

kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu: 1) ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa; 2) pengawasan anggota, dalam suasana organisasi

yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan; 3) Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditegaskan bahwa pengawasan sebagai upaya pengecekan atas jalannya perencanaan (planning) dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini, al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan al Qur'an lebih dahulu pada intropeksi, evaluasi diri pribadi sebagai pimpinan apakah sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan planning dan program yang telah dirumuskan semula. Setidak-tidaknya menunjukkan sikap yang simpatik dalam menjalankan tugas, selanjutnya mengadakan pengecekan atau memeriksa kerja anggotanya. Selain itu pengawasan dalam dakwah memiliki beberapa tujuan diantaranya :

a. Menjaga Keselarasan dengan Tujuan Dakwah

Dakwah bertujuan menyebarkan ajaran Islam yang benar, sehingga pengawasan dibutuhkan untuk memastikan bahwa para Da'i (pendakwah) tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam dan tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah

b. Menjamin Efektivitas dan Efisiensi

Pengawasan memastikan bahwa metode dan strategi dakwah yang digunakan efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat.

c. Mengidentifikasi Masalah dan Hambatan

Dengan adanya pengawasan, berbagai kendala yang muncul dalam aktivitas dakwah dapat segera diidentifikasi dan diatasi sebelum berdampak luas.

d. Meningkatkan Kualitas Dakwah

Evaluasi terhadap aktivitas dakwah dapat meningkatkan kualitas penyampaian pesan dan pemahaman masyarakat terhadap Islam.

e. Mencegah Penyalahgunaan dan Penyimpangan

Dalam beberapa kasus, dakwah bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau bahkan menyebarkan ajaran yang menyimpang. Oleh karena itu,

pengawasan diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan.

Tantangan

Aktivitas dakwah merupakan bagian integral dari kehidupan beragama, khususnya dalam masyarakat Muslim. Sebagai sarana penyebaran nilai-nilai keagamaan, dakwah memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan umat. Namun, di era globalisasi dan digitalisasi, pengawasan terhadap aktivitas dakwah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tantangan ini tidak hanya bersifat internal, seperti fragmentasi regulasi dan kapasitas kelembagaan, tetapi juga eksternal, seperti penyalahgunaan teknologi digital dan infiltrasi paham radikal. Pengawasan yang efektif terhadap aktivitas dakwah diperlukan untuk memastikan bahwa dakwah tetap berfungsi sebagai media pencerahan, bukan sebagai alat penyebaran paham ekstrem atau ujaran kebencian. Namun, upaya pengawasan ini sering kali terbentur oleh berbagai masalah struktural dan kultural.

Berikut beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kegiatan Pengawasan Aktivitas Dakwah, diantaranya:

a. Tantangan Regulasi dan Kebijakan

1) Fragmentasi Regulasi antara Pusat dan Daerah

Pengawasan dakwah di Indonesia terhambat oleh ketidakselarasan antara peraturan pusat dan daerah. Beberapa daerah menerapkan Perda Syariah yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan nasional, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 9 & 8 Tahun 2006. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam pengawasan.

2) Lemahnya Penegakan Hukum

Meskipun sudah ada aturan, penegakan hukum terhadap dakwah yang menyimpang (seperti ujaran kebencian, radikalisme, atau penipuan) sering kali lamban karena keterbatasan sumber daya aparat atau tekanan politik. Banyak da'i atau mubaligh yang tidak memiliki izin resmi (seperti sertifikasi dari Kementerian Agama) tetapi tetap leluasa berkhotbah, sehingga sulit dikontrol.

b. Tantangan Sosial dan budaya

1) Heterogenitas Masyarakat

Indonesia memiliki keragaman budaya, aliran keagamaan, dan tingkat pemahaman agama yang berbeda. Dakwah yang cocok di satu daerah mungkin dianggap kontroversial di daerah lain, sehingga sulit menentukan standar pengawasan yang berlaku universal. Masih ada kelompok yang menolak campur

tangan negara dalam urusan dakwah, menganggapnya sebagai bentuk pembatasan kebebasan beragama.

2) Maraknya Dakwah Populis dan Kontroversial

Beberapa pendakwah sengaja menggunakan narasi populistis, provokatif, atau kontroversial untuk menarik perhatian. Hal ini sering kali memicu perpecahan tetapi sulit dibendung karena besarnya pengaruh mereka di media sosial.

3) Resistensi dari Kelompok Tertentu

Kelompok-kelompok tertentu (seperti organisasi garis keras atau aliran ekstrem) sering kali menolak pengawasan dengan dalih "otoritas agama" berada di tangan ulama, bukan pemerintah. Hal ini memicu ketegangan antara kebebasan dakwah dan keamanan nasional

c. Tantangan Teknologi dan Digitalitas

1) Penyebaran Dakwah melalui Media Sosial Dengan berkembangnya platform digital, aktivitas dakwah semakin sulit diawasi karena konten dapat dibuat dan disebar oleh siapa saja tanpa filter. Banyak konten dakwah yang mengandung misinformasi, hoaks, atau ajaran radikal yang tersebar melalui YouTube, Telegram, TikTok, dan WhatsApp.

2) Viralnya Konten Provokatif

Algoritma media sosial cenderung mempromosikan konten yang sensasional atau kontroversial, sehingga dakwah ekstrem lebih cepat viral dibandingkan dakwah moderat. Hal ini memperumit upaya pengawasan dan counter-narasi

d. Tantangan Keamanan dan Radikalisme

1) Infiltrasi Paham Radikal

Beberapa kelompok dakwah digunakan sebagai alat penyebaran paham radikal atau terorisme dengan kedok kegiatan keagamaan. Pengawasan harus ekstra ketat untuk membedakan antara dakwah yang sah dan yang bermuatan ideologi berbahaya.

2) Ancaman Konflik Antarumat

Dakwah yang bersifat eksklusif atau menghina kelompok lain dapat memicu konflik sosial. Pengawasan diperlukan untuk mencegah ujaran kebencian (hate speech), tetapi sering kali baru dilakukan setelah terjadi kerusuhan.

e. Tantangan Kapasitas dan Sumber Daya Aparat

1) Keterbatasan SDM Pengawas

- 2) Minimnya Teknologi Pendukung
- 3) Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Risiko Dakwah Tanpa Pengawasan (Controlling)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam praktik dakwah Islam, terutama dengan hadirnya media sosial sebagai medium utama penyebaran pesan keagamaan. Di satu sisi, kemudahan akses ini membuka peluang luas bagi umat Islam untuk memperoleh pengetahuan agama. Namun di sisi lain, terbukanya akses tanpa regulasi dan pengawasan yang memadai justru memunculkan risiko serius bagi substansi dakwah dan ketahanan sosial umat.

Salah satu risiko utama dari dakwah tanpa mekanisme controlling adalah terjadinya distorsi ajaran. Dalam kondisi tanpa otoritas ilmiah dan kelembagaan, banyak penceramah menyampaikan materi keagamaan dengan pemahaman parsial dan seringkali lepas dari disiplin ilmu yang mapan. Dalam konteks dakwah populer di media sosial, banyak ustaz muda menyampaikan materi yang bernuansa simplistik dan retorik, mengabaikan kedalaman teks- teks klasik Islam. Akibatnya, masyarakat menerima pesan agama yang tidak utuh, bahkan menyimpang dari prinsip moderasi

Selain distorsi ajaran, absennya kontrol juga meningkatkan potensi penyebaran narasi- narasi ekstrem dan intoleran. Media sosial telah menjadi ruang baru bagi kelompok- kelompok radikal untuk mengamplifikasi ideologi mereka melalui konten dakwah yang dikemas secara menarik namun sarat muatan eksklusivisme. Tanpa pengawasan, konten seperti ini beredar luas dan mudah mempengaruhi generasi muda yang belum memiliki landasan keagamaan yang kokoh. Dakwah yang seharusnya menjadi alat pemersatu umat justru menjadi pemicu polarisasi dan konflik horizontal

Fenomena lain yang muncul adalah komersialisasi dakwah, di mana aktivitas penyebaran agama tidak lagi murni untuk kepentingan dakwah ilahiah, melainkan untuk kepentingan branding pribadi, monetisasi, dan popularitas. Banyak ustadz di media sosial sengaja menggunakan pendekatan sensasional dan provokatif agar konten mereka viral. Dalam proses ini, nilai-nilai etika dakwah seperti kelembutan, kearifan, dan kesantunan seringkali terabaikan. Dakwah berubah menjadi tontonan dan hiburan, bukan lagi tuntunan.

Risiko berikutnya adalah minimnya akuntabilitas. Dalam struktur dakwah tradisional, seorang da'i berada di bawah bimbingan dan pengawasan lembaga resmi seperti pesantren, majelis ulama, atau institusi pendidikan keislaman. Namun di era digital, banyak pendakwah berdiri secara independen tanpa naungan organisasi yang bisa memberi

evaluasi atau sanksi atas konten yang mereka sampaikan. Ketika terjadi kesalahan substansial dalam penyampaian materi dakwah, publik tidak memiliki saluran formal untuk meminta klarifikasi. Mekanisme kontrol pun hanya bersandar pada opini netizen yang kerap emosional dan tidak berdasar ilmiah.

Yang tak kalah berbahaya adalah penyebaran misinformasi keagamaan. Pesan-pesan keagamaan yang tidak tervalidasi dengan metode ilmiah seringkali bercampur dengan hoaks, teori konspirasi, dan pendapat pribadi yang diklaim sebagai kebenaran mutlak. Menyoroti bagaimana hoaks keagamaan dapat membentuk opini publik yang salah arah dan merusak kepercayaan terhadap institusi keagamaan resmi. Ketika konten dakwah tidak lagi dipandu oleh verifikasi ilmiah dan etika penyampaian, maka masyarakat rentan terhadap manipulasi

Keseluruhan kondisi ini mengindikasikan bahwa dakwah yang tidak terkontrol justru berisiko mencederai esensi Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin. Pentingnya mekanisme pengawasan yang adaptif dengan era digital, bukan dalam bentuk pengekangan kebebasan berpendapat, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab ilmiah dan moral dalam menyampaikan ajaran agama. Dalam konteks ini, controlling terhadap dakwah hendaknya dipahami sebagai upaya menjaga otentisitas ajaran, mencegah penyimpangan, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif disinformasi agama.¹⁵

Solusi dalam Menyelesaikan Berbagai Tantangan yang Ada

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan pengawasan aktivitas dakwah di era kontemporer, diperlukan pendekatan solutif yang komprehensif dan multidimensi. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Agama RI (2024), tercatat lebih dari 1,5 juta aktivitas dakwah yang memerlukan pengawasan efektif setiap tahunnya, baik yang bersifat formal maupun informal melalui platform digital. Kondisi ini menuntut penyusunan strategi pengawasan yang terintegrasi, meliputi aspek regulasi, teknologi, sosial, dan keamanan.

- a. Memperkuat Regulasi dan Koordinasi Antarlembaga
 - 1) Penyusunan pedoman dakwah yang jelas dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar.
 - 2) Meningkatkan sinergi antara Kemenag, BNPT, Polri, dan ormas Islam dalam pengawasan.
- b. Peningkatan Literasi Digital
 - 1) Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya hoaks dan konten radikal.
 - 2) Kolaborasi dengan platform media sosial untuk memfilter konten bermasalah.

- c. Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Membentuk forum pengawasan berbasis komunitas untuk memantau aktivitas dakwah di tingkat lokal.
 - 2) Memberikan insentif bagi whistleblower yang melaporkan dakwah menyesatkan.
- d. Pemanfaatan Teknologi
 - 1) Penggunaan AI dan big data untuk memantau konten dakwah di internet.
 - 2) Membangun database dai dan materi dakwah untuk memudahkan evaluasi.
- e. Pendekatan Deradikalisasi
 - 1) Program rehabilitasi bagi mantan pendakwah radikal.
 - 2) Memperkuat narasi dakwah moderat melalui ulama dan influencer yang kredibel.¹⁶

5. KESIMPULAN

Pengawasan aktivitas dakwah merupakan hal yang krusial untuk menjaga kerukunan beragama dan keamanan nasional. Namun, tantangan yang dihadapi sangat kompleks, mencakup aspek regulasi, sosial, teknologi, dan keamanan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, ulama, masyarakat, dan pihak teknologi untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif tanpa mengekang kebebasan berekspresi. Dengan pendekatan yang tepat, dakwah dapat tetap menjadi sarana pencerahan, bukan sumber konflik. Melalui pemantauan yang efektif, evaluasi, dan penilaian, pengawasan tidak hanya memastikan bahwa dakwah disampaikan dengan benar, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas penyampaian pesan.

Risiko dari dakwah yang tidak diawasi dapat mengarah pada distorsi ajaran Islam, penyebaran paham ekstrem, dan meningkatnya misinformasi keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan solusi solutif yang komprehensif, termasuk memperkuat regulasi, meningkatkan literasi digital, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, I. (2021). Sertifikasi Da'i dan efektivitas pengawasan konten keagamaan. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 9(1), 99–115.
- Amalia, R. (2020). Komersialisasi konten keagamaan di era selebgram ustaz. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(3), 98–113.
- Aziz, F. A. (2020). Menakar kesyariahan fintech syariah di Indonesia. *Al-Manahij*, 14(1), 1–18.

- Fauzan, A. (2021). Hoaks agama dan literasi digital masyarakat Muslim. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 23–37.
- Hamlan. (2019). Metode dan pendekatan dakwah. *Al-Mau'izah*, 5(1), 23–38.
- Hasan, M. (2021). Prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. *Jurnal Muftadiin*, 7(2), 111–123.
- Huda, M. (2020). Demokratisasi dakwah dan tantangannya di era digital. *Jurnal Dakwah Islam*, 14(1), 45–58.
- Kemenag RI. (2024). *Laporan tahunan aktivitas dakwah nasional*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Khatibah. (2011). Penelitian kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 5(1), 36–39.
- Mubarok, M. (2023). Big data dan AI untuk monitoring dakwah digital. *Teknologi Dakwah*, 2(2), 33–50.
- Ramakrishna, K. (2016). The global threat landscape in 2020. *Jurnal Strategi Internasional*, 13(1), 1–23.
- Ridwan, I. (2019). Mekanisme kontrol sosial dalam dakwah kontemporer. *Jurnal Studi Islam*, 8(2), 90–104.
- Sugiharto, B., & Syaifullah, M. (2023). Pengawasan dalam perspektif Islam dan manajemen. *ILTIZAM*, 7(1), 124–132.
- Sutrisno, A. (2019). Dakwah populer dan risiko penyederhanaan ajaran Islam. *Komunika*, 11(2), 76–89.
- Wicahyaningtyas, M. (2022). Controlling dalam perspektif. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 1–18.
- Zarkasyi, H. F. (2021). Dakwah dan radikalisme di media sosial. *Millah*, 20(1), 19–35.
- Zuhri, A. (2020). Etika dakwah di era digital. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 60–75.